

# OPINI PUBLIK

## IPM Rendah, Kadis Dikbud Jeneponto Minta Dukungan dari Pimpinan Daerah dan DPRD Dorong Pendidikan

Syamsir, HR - [JENEPONTO.OPINIPUBLIK.ID](http://JENEPONTO.OPINIPUBLIK.ID)

Sep 26, 2022 - 22:46



*Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, Drs. H. Nur Alam Basir, M.Si menyerahkan bantuan alat perlengkapan sekolah kepada salah seorang anak yang belum masuk sekolah di Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea/Syamsir.*

JENEPONTO- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud)

Kabupaten Jeneponto, Drs, Nur Alam Basir meminta kepada Pimpinan Daerah dan Legislatif untuk bersama-sama mendorong sektor bidang pendidikan.

Nur Alam menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IMP) di Kabupaten Jeneponto, disebabkan rata-rata lambat nya anak masuk sekolah.

"Kenapa angka IMP kita di Jeneponto rendah, salah satunya ditarik turun oleh rata rata lambat sekolah. Yang semestinya sudah bisa masuk sekolah tapi belum bersekolah," beber Nur Alam.

Hal itu, Kadis Pendidikan Nur Alam utarakan saat menyerahkan bantuan alat perlengkapan sekolah kepada salah seorang warga miskin yang anaknya belum masuk sekolah di Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Senin (26/9/2022).

Ini salah satu contoh saat Kadis Pendidikan beserta rombongan melakukan pemantauan langsung di lapangan, pihaknya menemukan tiga orang anak yang tidak bersekolah. Padahal, kata Nur Alam anak tersebut sudah cukup umur.

"Nah, ini kita temukan tiga orang anak di kawasan ini yang tidak bersekolah padahal sudah cukup umur semestinya ini kan sudah bisa masuk sekolah," katanya.

Olehnya itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto butuh dukungan dari Pimpinan Daerah da Legislatif untuk bersama-sama mendorong dan peduli dengan pendidikan termasuk anak anak yang lambat bersekolah.

"Kita berharap komisi IV DPRD Jeneponto yang membidangi pendidikan, seperti dengan kasus ini agar bisa membuka hati. Bukan hanya legislatif saja, akan tetapi semua pihak kita akan sentuh termasuk sektor swasta, perusahaan perusahaan untuk mengalokasikan CSRnya mendorong pendidikan," harapnya.

Dijelaskan juga, bahwa khusus untuk sektor pendidikan ada yang mengatur mengenai limit minimal alokasi APBD. Harus teralokasi 20 persen. Itu perintah UU untuk mengalokasikan anggaran disetiap pemerintahan 20 persen untuk sektor pendidikan.

"Jadi Mohon kami dibantu mengingatkan DPRD untuk tetap patuh kepada perintah UU karena ini adalah konstitusi," katanya.

Nanti dilihat, apakah di 2023 mendatang sudah mencukupi 20 persen atau tidak. "Karena terus terang untuk di Dinas Pendidikan sendiri untuk anggaran seperti ini tidak ada," pungkasnya.

Penulis: Syamsir.